

**PELAKSANAAN KEMITRAAN UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS) SOSIAL DENGAN PENGUSAHA KECIL DI
KECAMATAN RUPAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)



OLEH :

NURAINI
NIM. 10825004184

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Kemitraan UPTD Sosial dengan Pengusaha Kecil di Kecamatan Rupert Menurut Perspektif Ekonomi Islam**. Adapun yang melatar belakangi dalam skripsi ini adalah bahwa UPTD Sosial Kecamatan Rupert sudah melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil, tetapi kemitraan yang dilakukan UPTD Sosial Kecamatan Rupert di daerah ini belum merata, masih ada ketimpangan-ketimpangan didalam kemitraan tersebut. Padahal tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil yang dijadikan mitra binaannya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan Mitra Binaannya, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert dalam pelaksanaan program kemitraan di Kecamatan Rupert dan bagaimana pelaksanaan kemitraan UPTD Sosial Kecamatan Rupert dalam mengembangkan usaha kecil mitra binaannya menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) berlokasi di UPTD Sosial Kecamatan Rupert yang berada di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan UPTD Sosial terhadap mitra binaannya, untuk melihat kendala apa saja yang dihadapi oleh UPTD Sosial serta mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert.

Populasi dari penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang ketua UPTD Sosial Kecamatan Rupert dan 1 orang pegawai UPTD Sosial Kecamatan Rupert serta 10 orang pengusaha kecil yang dijadikan mitra UPTD Sosial Kecamatan Rupert. Karena terjangkau maka penulis menggunakan semua populasi menjadi sampel yaitu dengan teknik total sampling. Data primer diperoleh dari ketua UPTD Sosial Kecamatan Rupert dan pengusaha kecil yang dijadikan mitra binaan UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan cara observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dengan *metode deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh UPTD Sosial yaitu meliputi pemberian modal, pengawasan serta pembinaan terhadap pengusaha kecil. Faktor yang melatar belakangi UPTD Sosial dalam melakukan kemitraan ini karena terdapat masyarakat yang kurang mampu baik dalam permodalan maupun dalam kemampuan dan sumber daya manusia untuk mengelola usaha sesuai prinsip-prinsip manajemen modern. Mereka hanya menjalankan Usaha ini berdasarkan kebiasaan saja. Diadakannya program kemitraan ini dengan tujuan agar mereka dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Kendala dalam program kemitraan ini yaitu dalam penyaluran bantuan modalnya masih diberikan kepada orang-orang terdekat dengan kata lain didalam penyaluran bantuan modal tidak sesuai dengan kriteria orang yang berhak menerimanya, sehingga masih belum terciptanya keadilan yang menyeluruh.

Kendala lainnya dalam aspek pengawasan bisa dikatakan kurang efektif karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert. Hal ini dikarenakan anggota yang termasuk kedalam jajaran UPTD Sosial tersebut masih berjumlah satu orang. Yaitu hanya seorang kepala UPTD Sosial tersebut serta. Kendala berikutnya yaitu didalam pembinaan antara lain, dibidang keterampilan masih banyak pengusaha kecil yang tidak mengikuti, sehingga sulit untuk mengetahui yang dihadapi oleh mitranya dan lemahnya kemauan pengusaha kecil didalam pembinaan, terbatasnya pengetahuan serta tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan. Kurang kesadaran para mitra nya dalam mengikuti pelatihan baik pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan teknologi.

Menurut ekonomi Islam, kemitraan yang dilakukan UPTD Sosial dalam penyaluran bantuan modal belum sesuai dengan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta supaya kita menetapkan dengan adil. Melakukan kemitraan yang menghasilkan keuntungan antara pihak yang bekerjasama dibolehkan dengan prinsip tolong menolong, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Kemitraan yang dilakukan UPTD Sosial Kecamatan Rupert memberikan kemaslahatan bagi masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa diaturnya kepada roh penyelamat alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatNya dari alam kenistaan dan kebobrokan moral ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki sampai sekarang ini.

Penulisan skripsi yang berjudul ” **Pelaksanaan Kemitraan UPTD Sosial Dengan Pengusaha Kecil di Kecamatan Rupat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**” dimaksud untuk melengkapkan tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahnda Aliyas (ALM) dan Ibunda Nurlela, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini. kakaku dan adikku (Rozita, S.Pd dan Mustafa kamal) yang telah memberikan semangat kepada penulis dan

Phapaku (Ermadona, S. Pd) yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan ini.

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir, selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd serta pembantu Dekan I, II, III.
4. Bapak Nurwahid M.Ag, selaku penasehat akademis yang banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademis.
5. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Dr.Hajar Hasan M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, Ilmu serta masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
8. Staff karyawan/I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
9. UPTD Sosial Kecamatan Rupert . Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga kecil ku, Dewi, Mar, Yolana Siska dan kak lina, Teman KKNku, Noridah, Riza dan Ana Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan bantuannya. Serta teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU angkatan 2008.

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 01 Januari 2013

NURAINI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Permasalahan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Rupert	12
1. Karakteristik wilayah	12
2. Jumlah Penduduk	12
3. Sarana Pendidikan	14
4. Kehidupan Beragama	15
5. Mata Pencaharian Masyarakat	17
B. Profil UPTD Sosial Kecamatan Rupert.....	18
a. Peraturan UPTD Sosial Kecamatan Rupert.....	18
b. Susunan Organisasi	18
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian Kemitraan.....	20
B. Dasar Hukum Kemitraan.....	26
C. Usaha Kecil	27

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan Mitra Binaannya.....	39
B. Kendala-Kendala Yang di Hadapi UPTD Sosial Kecamatan Rupert Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan di Kecamatan Rupert	46
C. Pelaksanaan Kemitraan UPTD Sosial Kecamatan Rupert Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menurut Perspektif Ekonomi Islam	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	74P

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, usaha kecil dan menengah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena usaha kecil merupakan penyumbang besar bagi kekuatan ekonomi.

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kelayakan yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil.¹

Menurut Subanar, usaha kecil memiliki arti strategis secara khusus bagi perekonomian diantaranya :

1. Dalam banyak pekerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak menggantungkan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Karena jika dikerjakan sendiri oleh mereka (perusahaan besar) maka marginnya tidak ekonomis.
2. Merupakan pemerataan konsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.²

Kehadiran sektor usaha mikro dan kecil merupakan fakta semangat kewirausahaan di tengah masyarakat. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi melalui UMKM merupakan hal yang sangat strategis guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan³. Namun disadari, pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti

¹ Sudono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.365.

² Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), h.18.

³ Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi I,(Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 483.

tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan usaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan ataupun industri pengolahan. Usaha bentuk perdagangan luas ruang lingkupnya yaitu mencakup bidang jasa yang berwujud dan yang tidak berwujud. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko klontong, pengedar dan grosir yang mempunyai toko-toko di bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri.⁴

Dilihat dari segi manajemen, kondisi usaha kecil dan menengah masih memerlukan pengembangan yang tidak sebanding dengan perannya sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Untuk itu, pembinaan usaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah.

Kecakapan bisnis masyarakat dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah harus menyediakan kesempatan bagi para calon wirausaha untuk mendapatkan pengalaman bisnis dan mempraktekkan kewirausahaan.⁵

Untuk lebih meningkatkan produksi dan pengembangan usaha kecil maka pemerintah telah berusaha membantu. Salah satu badan yang memberikan dan menyalurkan bantuan adalah UPTD sosial.

⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, Edisi I, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 365.

⁵ Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Ekonisa, 2002), h. 342.

UPTD sosial merupakan salah satu instansi Pemerintah yang bergerak di bidang jasa, guna dapat membentuk usaha kecil dan menengah dalam mengatasi permasalahan modal yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah.

Di samping itu, UPTD Sosial merupakan badan yang bergerak di bidang sosial. Misalnya menangani masalah-masalah sosial, mencakup di dalamnya permasalahan orang yang mengalami gangguan jiwa yang perlu mendapatkan pemulihan, memberikan bantuan pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah.⁶

Bantuan yang diberikan oleh UPTD Sosial PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) merupakan bantuan usaha ekonomis. Bantuan ini diberikan kepada penyandang cacat dan putus sekolah, mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Diantaranya, mereka diberi bantuan berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari (sembako) serta mereka didirikan tempat berusaha untuk mengembangkan usaha yang diberikan tersebut. Selain itu, UPTD Sosial PMKS, juga memberikan keterampilan khusus meliputi pelatihan menjahit, pelatihan elektronik serta pelatihan dalam berusaha. Dan juga UPTD Sosial PMKS Kecamatan Rupert menyalurkan program kelompok usaha bersama (khususnya menjahit), menyalurkan bantuan usaha ternak ayam dan kambing serta memberikan bantuan kepada orang-orang susah yang layak menerimanya.

⁶ M. Zain (Kepala UPTD Sosial Kecamatan Rupert), *Wawancara, tanggal 8 September 2012*

Pengembangan usaha kecil didalam penyaluran diberikan terutama bagi orang-orang terdekat dalam arti adanya pilih kasih didalam penyalurannya.

UPTD Sosial Kecamatan Rupert tidak hanya memberikan bantuan berupa modal, namun para pengusaha tersebut juga memberikan arahan dan bimbingan supaya usaha yang sedang dijalankan dapat terarah kepada yang lebih baik dan ikut langsung dalam mengatasi masalah, apabila mereka mengalami masalah dalam mengelola usahanya, pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert melalui program kemitraan kepada pengusaha kecil tersebut, yang diharapkan mampu bersaing dan meningkatkan produktifitas.

Program kemitraan adalah suatu kunci keberhasilan dalam memberikan peluang usaha kecil, yang mana dalam hal ini pemerintah telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Menurut Muhammad Jafar Hafsa,

⁷ James dan Akrasane, *Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta : LP3ES, 1993), h. 20.

kemitraan adalah suatu strategis bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membantu dan saling membesarkan”⁸.

Kerjasama dalam istilah Islam adalah syirkah yang artinya menurut bahasa adalah campur atau campuran⁹. Demikian dinyatakan oleh Taqiyyudin, maksud campuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikthilath* yang artinya adalah campur atau campuran. Adapun menurut istilah syirkah adalah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan¹⁰. Atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk membuka perusahaan dengan tujuan membagi keuntungan, kerjasama ini bisa dalam bentuk modal dan jasa, persentase kepemilikan saham, pengelola dan bidang apa saja yang akan diharapkan.

Dasar hukum kerjasama salah satunya terdapat pada Al-Qur'an Surat

Shaad ayat: 24



Artinya: “ Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali

⁸ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h. 10.

⁹ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 125.

¹⁰ [Http://FathulBarie V: 129.co.id](http://FathulBarieV:129.co.id), diakses tanggal 7 juli 2012.

orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. “ (QS. Shaad: 24)¹¹.

Program kemitraan sebagai salah satu cara yang dapat diharapkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dimana industry kecil diharapkan tidak hanya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang mendasar saja melainkan juga semua persoalan yang dihadapi dan mengemangkan usahanya. Keinginan dan upaya yang baik tersebut memang tidak mudah diwujudkan, namun dengan kesungguhan wirausaha dapat merealisasikan. Namun, perlu disadari bahwa melaksanakan program kemitraan bukan tantangan atau hambatan yang datangnya dari para wirausaha sendiri¹².

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert terhadap pengusaha kecil dalam upaya mengembangkan usaha kecilnya serta kebijakan dan keikutsertaan UPTD Sosial Kecamatan Rupert dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya dan sebab-sebab terjadinya masalah tersebut dalam bentuk kerjasama dan bagaimana hasil kerjasama tersebut. Dengan demikian penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Kemitraan UPTD Sosial Dengan Pengusaha Kecil Di Kecamatan Rupert Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. toha Putra, 2002), h. 141.

¹² Tarsis Tarmuji, *Prinsip-Prinsip Wirausaha*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 51.

B. Batasan Masalah

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai masalah kemitraan UPTD Sosial dengan pengusaha kecil mitra binaannya di Kecamatan Rupert dalam mengembangkan usahanya menurut tinjauan ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan Mitra Binaannya
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi UPTD Sosial Kecamatan Rupert dalam pelaksanaan program kemitraan di Kecamatan Rupert
3. Bagaimana pelaksanaan kemitraan UPTD Sosial Kecamatan Rupert dalam mengembangkan usaha kecil mitra binaannya menurut perspektif ekonomi Islam

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan pengusaha kecil mitra binaan.
 - b. Untuk melihat kendala apa saja yang dihadapi oleh UPTD Sosial dalam mengelola mitra binaannya di Kecamatan Rupert.

- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh UPTD Sosial terhadap mitra binaannya itu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah yang terkait dengan UPTD Sosial Kecamatan Rupat
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pengusaha kecil atau pemilik industri dalam upaya peningkatan industri, efisien dan peningkatan terhadap pendapatan serta kondisi kehidupan dan taraf hidup pengusaha dan parra pekerjanya.
- c. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi penulis yang lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum jurusan Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di daerah tersebut terdapat hubungan kerjasama antara UPTD Sosial dengan binaannya

2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini sebanyak 11 orang. Yang terdiri 1 orang kepala UPTD Kecamatan Rupert dan 10 orang pengusaha kecil yang dijadikan mitra binaannya, karena terjangkau maka penulis menggunakan total sampling.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah UPTD Sosial Kecamatan Rupert dan pengusaha kecil
- b. Objek dalam penelitian ini adalah kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan mitra binaannya.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian melalui daftar pertanyaan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau laporan-laporan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kegunaan dan maksud dari penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.

- b. Wawancara, penulis mengajukan Tanya jawab beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan, penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Teknik Penulisan

Setelah data di peroleh penulis membahas dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan teliti.
- b. Deduktif, yaitu menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan yang sistematis, maka pembahasan ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut:

- Bab I Terdiri dari pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode pengumpulan data dan metode penulisan
- Bab II Tinjauan lokasi penelitian yang akan menerangkan tentang profil Kecamatan Rupert dan profil UPTD Sosial Kecamatan Rupert
- Bab III Tinjauan umum tentang pengertian kemitraan, bentuk-bentuk syirkah, dasar hukum syirkah dan usaha kecil serta jenis-jenis usaha kecil.
- Bab IV Tinjauan umum tentang bentuk-bentuk kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupert dengan mitra binaan, kendala-kendala yang dihadapi dalam kemitraan, dan tinjauan ekonomi islam tentang kemitraan UPTD Sosial Kecamatan Rupert dalam mengembangkan usaha kecil mitra binaan.
- Bab V Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Rupert

1. Karakteristik wilayah

Kecamatan Rupert merupakan salah satu dari tiga belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Luas kecamatan Rupert $\pm 896,35 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 4 kelurahan dan 8 desa. Kecamatan Rupert keadaan tanahnya datar yang mana letak geografisnya desa atau kelurahan di pesisir pantai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rupert Utara/Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Rupert
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rupert Utara/Selat Malaka
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bengkalis

Adapun lokasi kantor UPTD Sosil terletak di Jalan Pelajar Kelurahan Batupanjang.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, Baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk yang memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang akan

menggerakkan dan yang akan digerakkan dalam suatu proses pembangunan.

Penduduk di Kecamatan Rupert berjumlah sekitar 31.418 jiwa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan Rupert terdiri atas 4 kelurahan dan 8 desa, di mana jumlah penduduk yang paling dominan terdapat di Desa Pangkalan Nyirih yaitu 4.571 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah di Desa Darul Amal yaitu sebanyak 1.246 jiwa, untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Batupanjang	2.844	1.708	4.552	15
2	Terkul	1.633	1.712	3.345	11
3	Pergam	958	922	1.880	6
4	Tanjung Kapal	1.666	1.522	3.188	10.14
5	Darul Aman	651	595	1.246	4
6	Sukarjo Mesim	657	607	1.264	4.02
7	Teluk Lecah	1.633	1.776	3.409	11
8	Parit Kebumen	708	782	1.490	5
9	Makeruh	675	689	1.364	4.34
10	Sungai Cingam	1.163	1.164	2.327	7.40
11	Pangkalan Nyirih	2.348	2.223	4.571	15
Jumlah		16.382	15.036	31.418	100

Dari table di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak apabila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.

3. Sarana Pendidikan

Faktor pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan. Berkualitasnya pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah itu sendiri. Pendidikan juga dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang unggul pada masa yang akan datang sehingga mampu bersaing di Era Globalisasi.

Dalam beberapa dekade ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Rupert telah menyadari arti pentingnya dari sebuah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini, dimana masyarakat yang mengenyam pendidikan Formal.

Tabel II
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Rupert

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/belum pernah sekolah	5.766	18.4
2	Tidak/belum tamat SD	5.858	19
3	Tamat/SD/MI/Sederajat	7.001	22.3
4	Tamat SLTP/MTS/Sederajat	6.530	21
5	Tamat SMU/SMA/SMK/Sederajat	5.248	17
6	Tamat S1	357	1.14
7	Tamat S2/S3	2	0.7
Jumlah		31.418	100

Pendidikan akan dapat terlaksana dengan maksimal apabila didukung oleh sarana yang memadai. Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Rupert sebanyak 61 unit kecuali perguruan tinggi, dinilai cukup untuk menunjang pendidikan masyarakat.

Tabel III
**Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Rupert**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	TK (Taman Kanak-kanak)	4	5.26
2	SD (Sekolah Dasar)	30	39.47
3	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	6	7.9
4	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	7	9.21
5	SMU (Sekolah Menengah Umum)	6	7.9
6	MA (Madrasah Aliyah)	4	5.26
7	MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)	19	25
Jumlah		76	100

4. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia dalam artian manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, sebagaimana juga telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (1) “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”.

Pada umumnya masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Rupert sekitar 25.439 jiwa atau 81% terlihat bahwa mayoritas memeluk Agama Islam, akan tetapi ada juga yang beragama Kristen, Budha, dan Katolik,

dan Konghucu. Agama yang paling minoritas adalah agama Katolik yakni sebanyak 408 jiwa atau 1% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel IV
Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rupert

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	25.439	80.96
2	Kristen	1.167	3.71
3	Budha	3.920	12.5
4	Katolik	408	1.29
5	Konghucu	484	1.54
Jumlah		31.418	100

Untuk menjalankan Ritual keagamaan, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana yang dimaksud yakni berupa tempat beribadah. Banyaknya tempat beribadah di Kecamatan Rupert dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel V
Jumlah Sarana Peribatan di Kecamatan Rupert

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Masjid	42	43.75
2	Musholla	42	43.75
3	Gereja	7	7.3
4	Vihara	4	4.16
5	Pura	1	1.04
Jumlah		96	100

Dari tabel di atas memperlihatkan adanya keseimbangan sarana peribadatan umat Islam yang tersedia yakni antara Masjid sebanyak 42 atau 44%. Sedangkan sarana peribadatan agama yang lainnya sangat minim sekali.

5. Mata Pencaharian Masyarakat

Untuk mata pencaharian yang ada di Kecamatan Rupert pada umumnya lebih banyak berkebun yakni sebanyak 3.344 jiwa atau 44% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Rupert

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	1.693	22.03
2	Perkebunan	3.344	43.53
3	Peternakan	492	6.40
4	Perikanan	680	8.9
5	Kehutanan	118	1.53
6	Industri	162	2.10
7	Perdagangan	528	6.87
8	Pegawai Negeri Sipil	230	2.99
9	Tenaga Honorer	301	3.91
10	TNI/POLRI	27	0.35
11	Jasa-jasa Lainnya	107	1.39
Jumlah		7.682	100

6. Profit UPTD Sosial Kecamatan Rupert

a. Peraturan UPTD Sosial Kecamatan Rupert

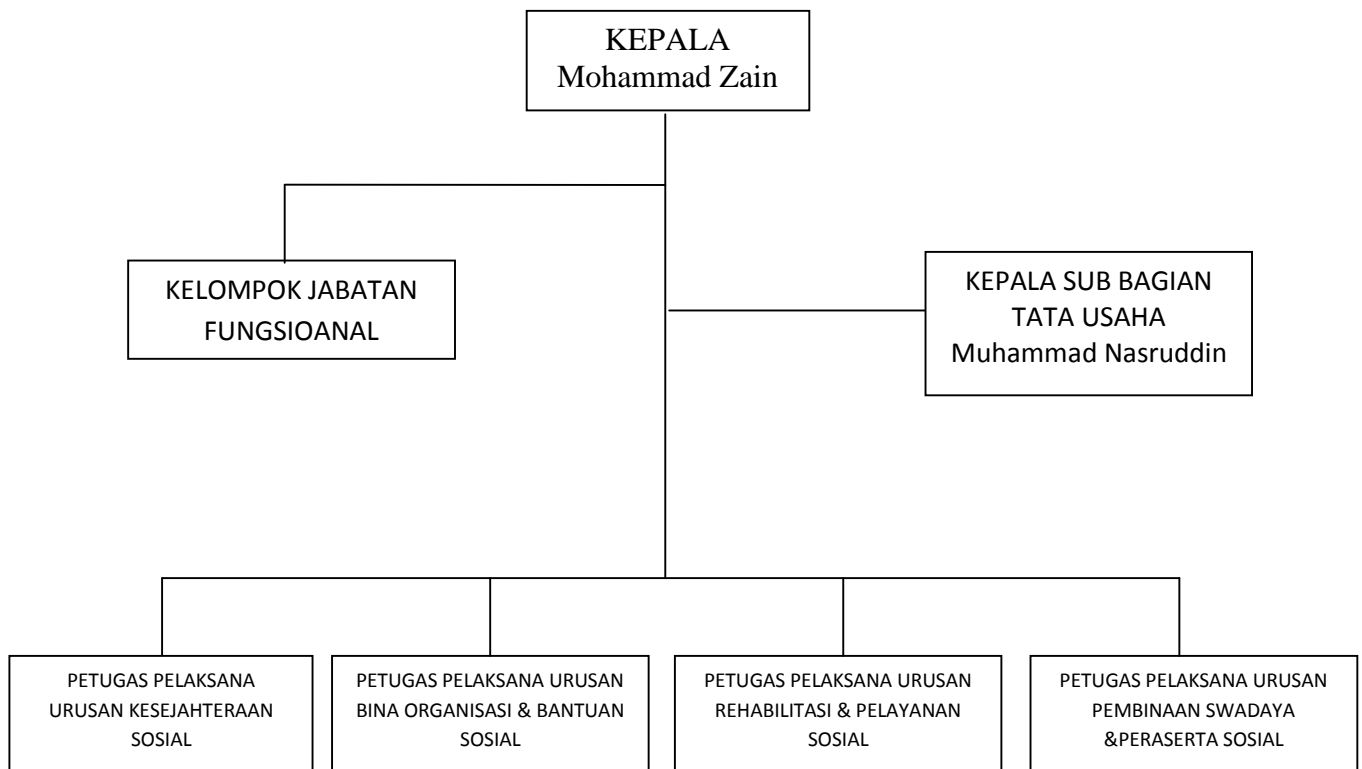
Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial (UPTD Sosial) Kecamatan Rupert, dijelaskan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdapat juga pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial di Kecamatan se- Kabupaten Bengkalis.

Unit pelaksana teknis dinas adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi dinas sosial di kecamatan Rupert. Unit pelaksana teknis dinas sosial ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

- 1) Kepala unit pelaksana teknis dinas
- 2) Kepala sub bagian tata usaha
- 3) Petugas pelaksana urusan kesejahteraan sosial
- 4) Petugas pelaksana urusan Bina Organisasi dan Bantuan sosial
- 5) Petugas pelaksana urusan rehabilitas dan pelayanan sosial
- 6) Petugas Pelaksana urusan pembinaan swadaya dan peran serta sosial
- 7) Kelompok jabatan fungsional

Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Teknis Dinas Sosial**Kecamatan Rupert**

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kemitraan

1. Pengertian kemitraan

Pengertian kemitraan terdapat perbedaan, untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa pengertian di antaranya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemitraan artinya kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.¹

Menurut Muhammad Jafar Hafsah, “ Kemitraan adalah suatu strategis bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.²

Menurut para ahli, Kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pendekatan bidang ekonomi dalam rangka pemerataan usaha dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.³

¹ Martin Carnoy dan Derek Shearer, *Ekonomic Democracy*, (Sharpe Inc, 1980), h. 275-276.

² Mohammad Jafar Hafsah, *kemitraan Usaha*, (Jakarta: sinar Harapan, 2000), h.10.

³ Jeane Neltje saly, *Usaha kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif perdagangan internasional*, (Jakarta: badan Pembinaan hokum Nasional, 2001), h. 35.

Oleh sebab itu, untuk mempercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan tersebut di atas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil dimulai tahun 1984 yaitu dengan UU No. 5 Tahun 1984 tentang undang-undang pokok perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai sanksinya.

Tiga unsur utama dalam pengertian kerjasama yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dipihak lain
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar
- c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kerjasama dalam istilah Islam disebut *Syirkah* yang artinya menurut bahasa adalah campur atau campuran.⁴ Demikian dinyatakan oleh *Taqiyyuddin*, yang dimaksud percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Adapun menurut istilah *Syirkah* adalah perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.⁵ Atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk membuka perusahaan dengan tujuan membagi keuntungan. Kerjasama ini bisa dalam

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 125.

⁵ [Http: /// fathul barie V : 129, co. id](http://fathulbarie.com), diakses tanggal 13 Oktober 2012.

bentuk modal atau jasa, persentase kepemilikan saham, pengelola dan bidang apa saja yang akan digarap bersama.⁶

Menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah* para fuqaha berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Menurut *Sayyid Sabiq* yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut *Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib*, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
3. Menurut *Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husni*, *syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
4. Sedangkan menurut *Idris Ahmad* menyebutkan *Syirkah* sama dengan syirkah dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

2. Bentuk-Bentuk Syirkah (Kerjasama)

Menurut *Sayyid Sabiq*, *syirkah* atau kerjasama ada empat macam antara lain yaitu:⁷

⁶ *Ibid.*,

⁷ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),h. 69.

1. *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama-sama banyak. Bila ada anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota perserikatan.
- c. Satu agama sesama muslim, tidak sah berserikat dengan sesama non muslim.
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).

3. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah abnan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lain-lain.

5. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal) sedangkan pihak yang lainnya memberikan kontribusi modal (mal).⁸

Langkah-Langkah dan aspek yang harus diperhatikan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan program kemitraan agar tujuan tersebut terlaksanakan dengan baik :

- 1) Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- 2) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping
- 3) Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha

⁸ M. Sholihuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 146.

- 4) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.⁹

Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam mempersiapkan program kemitraan

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan program kemitraan yaitu :

- 1) Aspek pembinaan

Merupakan pembinaan baik SDM, manajemen usaha, pasar dan informasi serta teknologi

- 2) Aspek pembiayaan.

- 3) Aspek Kemitraan.

Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerjasama antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan

- 4) Aspek Yuridis Formal.

Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah.¹⁰

⁹ A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1998), Cet. Ke, 1, h.117.

¹⁰ Zulkairnain, *Mebangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa 2003), Cet. Ke, 1, h. 14.

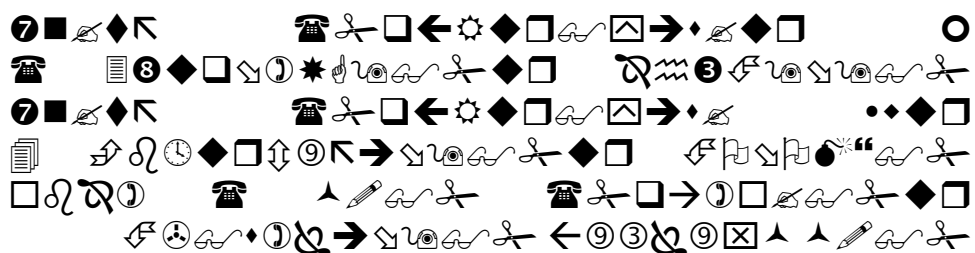
5) Hal-hal Yang Harus di Perhatikan Pada Sistem Ekonomi Saat Ini

Yang akan Diarahkan Pada Program Kemitraan

- a) Perhatikan karakteristik daerah serta latar belakang keahlian mayoritas masyarakat setempat.
- b) Kembangkan ekonomi berbasis rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keahlian mayoritas masyarakat setempat.
- c) Perhatikan ciri-ciri khas atau karakteristik daerah, dengan meningkatkan nilai (value) dari potensi yang ada.
- d) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui perbaikan infrastruktur atau fasilitas apapun agar ekonomi rakyat tumbuh.
- e) Mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal/UMKM dengan pemberdayaan pembentukan koperasi produktif.¹¹

B. Dasar Hukum Kemitraan

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat:2



Artinya: “Dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah SWT,

¹¹ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: alfabeta, 2009), Cet. Ke-2, h. 66.

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Almaidah : 2)¹²

2. Al-Qur'an Surat Shaad ayat : 24



Artinya: “ Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (QS. Shaad: 24)”¹³

3. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah

أَنَّ ثَلَاثَ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَادَاخَانَهُ حَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا
(رواه البوداود الها لم وصحيه إسناده)

Artinya : “ Aku jadi yang ketiga antara orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat pada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lainnya, maka keluarlah aku darinya” (HR. Abu Daud).¹⁴

C. Usaha Kecil

a. Pengertian Usaha Kecil

Dewasa ini usaha kecil dan menengah mampu memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, karena usaha

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : PT Toha Putra, 2002) h. 156.

¹³ *Ibid*, h. 733.

¹⁴ Abu Daud Sulaiman Bin Asy Ats, *Shahih Abu Daud*, Jus 3, (Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi, tt), h. 1012.

kecil merupakan penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah terbukti, terutama disaat resesi ekonomi tahun 1985 dan 1997.

Sesuai dengan arahan GBHN, pembangunan industri pada umumnya untuk meningkatkan nilai tambah, menyediakan dan jasa bermutu dengan harga saing dipasaran dalam negeri, meningkatkan ekspor serta mengembangkan penguasaan teknologi.

Menurut Subanar, usaha kecil memiliki arti strategis secara khusus bagi perekonomian di antaranya :

1. Dalam banyak pekerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak menggantungkan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Karena jika dikerjakan sendiri oleh mereka (perusahaan besar) maka marginnya tidak ekonomi.
2. Merupakan pemerataan konsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat¹⁵.

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil dan nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerjaan yang juga kecil.¹⁶ Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang no 9 tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar).

¹⁵ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 18.

¹⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 365.

2. Milik warga negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha perorangan

Jenis usaha yang mempunyai kriteria seperti diatas oleh Bank Indonesia dikelompokkan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan Kredit Usaha Kecil (KUK). Kredit usaha kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan kredit keseluruhan maksimal Rp. 500.000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp. 200.000.000,-.¹⁷ Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaan yaitu:¹⁸

- a) Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang

¹⁷ Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses)*, (Bandung: Salemba Empat, 2003), h. 119.

¹⁸ Mudrahat, Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 365.

- b) Industri kecil dengan pekerja 19-20 orang
- c) Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- d) Industri dengan pekerja 100 atau lebih.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop dan UKM) mendefinisikan usaha kecil termasuk usaha mikro sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp. 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan definisi usaha besar adalah badan usaha dengan nilai omset diatas dari itu.¹⁹

Sedangkan pengertian pengusaha dijelaskan oleh Maryoto Rahmat adalah seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan (business opportunities) dan merealisasikan dalam bentuk sarana-sarana yang harus dicapai.²⁰

Secara spesifikasi adapun masalah dasar yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar peluang pasar.

¹⁹ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Gbalia Indonesia, 2001), h. 307.

²⁰ Maryoto, Rahmat, *Serikat Pekerja Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991), h. 51.

2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Keterbatasan jaringan usaha antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif, persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Agar tidak terjadi masalah dalam usaha kecil maka ada beberapa strategi untuk pemberdayaan yang tepat yang dapat diklasifikasikan dalam:²¹

- a. Aspek manajerial yang meliputi peningkatan produktifitas atau tingkat utilitas meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Aspek permodalan yang meliputi bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portopolio kredit bank) dan kemudahan kredit.
- c. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak Anak Angkat.

²¹ Mudrajat Kuncoro, *Op Cit.*, h. 369.

- d. Pengembangan usaha industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang diduduki oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluhan Industri).
- e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat tenaga penyuluhan industri dan koperasi industri kecil dan kerajinan.

Berdasarkan pengertian dan batasan industri atau usaha kecil, perlu dikemukakan tujuan dari pengembangan industri. Berdasarkan ketentuan dalam GBHN tujuan pengembangan industri adalah:

1. Untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya.
2. Untuk dapat mengisi dan mewujudkan pendalaman struktur industri nasional baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Untuk mampu memperkuat struktur ekonomi, baik dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, energi dan terutama manusia melalui perluasan usaha yang telah ada ditambah penciptaan usaha baru.
4. Untuk dapat menaikkan sumbangan pada pendapatan nasional melalui penyempurnaan sistem usaha peningkatan tenaga kerja.
5. Mampu melestarikan dengan mengembangkan segi-segi kebudayaan nasional sebagai kekayaan bangsa yang bernilai tinggi.

Menurut Lampelius dan Toha, kemungkinan permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil adalah untuk membiayai sendiri usahanya terbatas mengingat perusahaan- perusahaan itu sebagai produksi yang tidak ekonomis atau ketergantungan dari pedagang-pedagang besar di segi finansial tidak mendapatkan keuntungan. Disamping itu laba yang diperoleh tidak disalurkan kembali untuk kepentingan perusahaan melainkan kepentingan sendiri.²²

Dengan melihat berbagai masalah pokok yang dihadapi oleh industri kecil perlu adanya perhatian khusus kepada pembinaan industri menuju tujuan yang diharapkan.

b. Jenis-Jenis Usaha Kecil

Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:²³

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam artian belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis paling banyak Rp. 100 juta.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria berikut:

²² Christian Lampelius, Gert Thoma, *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: LP3ES, 1979), h. 50.

²³ Zulkarnaian, *Kewirausahaan “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin”*, (Yogyakarta: Adicita, 2006), h. 125-126.

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
 - c. Usaha yang berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.
 - d. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
3. Usaha menengah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih dari 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Usaha yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai dan terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau berskala besar.
 - c. Berbentuk usaha yang dimiliki perorangan, badan hukum yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi.

Ketidakpahaman tentang kriteria tersebut diatas sering menyebabkan pengertian UKM menjadi berbeda sehingga sulit untuk mengambil suatu kesimpulan dan keputusan yang diperlukan.

Bagaimanapun, usaha skala mikro, kecil dan menengah memiliki perbedaan yang melekat tentang ketiganya. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap mereka juga memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda walaupun terdapat beberapa kesamaan.

Dalam rangka pembinaan koperasi dan pengusaha golongan lemah, yang bertujuan sebagai langkah awal guna mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 1232/kmk.013/1989 telah mengeluarkan “Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara”.

Namun disadari pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan oleh pengusaha kecil adalah:²⁴

- a) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

²⁴ Mudrajat, Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 368.

- b) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal venture karena kebanyakan pengusaha kecil mengeluh prosedur mendapat kredit yang berbelit, anggaran tidak memenuhi syarat dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.
- c) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
- d) Masalah akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
- e) Masalah memperoleh bahan baku, terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku.
- f) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu dan banyak barang pengganti.
- g) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.²⁵

Dengan adanya beberapa kelemahan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk membantu mengembangkan industri kecil. Beberapa alasan perlunya pengembangan usaha kecil sebagai berikut:²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 368.

²⁶ Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 11.

- a. Usaha/perusahaan kecil yang menyerap atau melibatkan sejumlah besar sumber daya manusia didalamnya para wirausahawan atau calon-calon wirausahawan.
- b. Dalam jangka pendek dapat mengatasi pembagian pendapatan yang belum rata dan juga mengatasi masalah pengangguran.
- c. Dapat mempertinggi kemampuan produktif sumber daya manusia karena mereka dapat belajar pada tempat mereka bekerja.
- d. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan kecepatan perusahaan struktur ekonomi semua daerah.

Beberapa langkah untuk mengembangkan usaha kecil antara lain:²⁷

- a. Penyebarluasan dan pengembangan minat usaha.
- b. Pemberian bantuan kredit dari bank dengan syarat lunak bagi para pengusaha kecil.
- c. Peningkatan keterampilan angkatan kerja dengan perluasan kesempatan kerja.
- d. Membentuk atau mengaktifkan kembali sentra-sentra industri kecil dipedesaan untuk memperluas kesempatan kerja pedesaan.
- e. Pemerintah melalui Departemen terkait dan pemerintah daerah setempat dapat menyediakan indikator yaitu berupa fasilitas bagi para pengusaha yang masih pemula untuk memperoleh semacam konsultasi

²⁷ *Ibid.*, h. 12.

atau informasi tentang segala yang menyangkut kebutuhan untuk mengembangkan usahanya.

- f. Pembatasan investasi pada industri pada modal dan memperbanyak perluasan kesempatan berusaha dengan cara mendorong terbentuknya sistem mitra usaha dan bapak angkat antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.

Perusahaan BUMN yang menjadi perantara untuk mengembangkan bakat wirausaha kepada para masyarakat tidak mampu memenuhi keinginan yang sesuai dengan tergetnya. Perusahaan yang seharusnya memenuhi syarat untuk melakukan pembinaan bagi para pengusaha yang layak dibina hanya diberikan bantuan berupa pinjaman saja tanpa diiringi dengan pembinaan-pembinaan tentang cara mengembangkan usaha dengan baik dan benar.

BAB IV
PELAKSANAAN KEMITRAAN UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS) SOSIAL DENGAN PENGUSAHA KECIL DIKECAMATAN
RUPAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Bentuk Kerjasama UPTD Sosial Kecamatan Rupat Dengan Mitra Binaannya

Penduduk miskin merupakan masalah yang tidak pernah berkesudahan, meskipun Indonesia sudah melaksanakan pembangunan nasional, regional serta mengutamakan pembangunan dibidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Disamping pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Apabila pengurangan kemiskinan dapat dilanjutkan terus, maka akan memperkuat salah satu dari trilogy pembangunan, yaitu stabilitas ekonomi. Sehingga pembangunan dapat dilanjutkan terus menerus. Pembangunan yang berkelanjutan terus amat diperlukan guna mempercepat pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi
2. Untuk membuka dan meratakan pembangunan

Tingkat kesejahteraan dapat dibedakan oleh beberapa faktor baik yang ada di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan.

Melihat keadaan masyarakat tersebut, maka UPTD Sosial Kecamatan Rupat menyelenggarakan suatu program kemitraan, yang diperuntukkan terhadap usaha sembako, yang diberikan sekitar tahun 2009 akhir. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 UPTD Sosil Kecamatan Rupat juga memberikan pelatihan berupa keterampilan seperti keterampilan dalam bidang menjahit serta keterampilan dibidang elektronik dan juga memberikan bantuan kepada kelompok menjahit lainnya, memberikan bantuan yang dikhususkan pada usaha peternakan dan pertanian.

Selain kemitraan pembinaan, UPTD Sosial juga merupakan instansi yang bergerak dibidang sosial, mencakup menangani masalah sosial, orang gila, orang tidak mampu untuk berobat, menangani orang yang putus sekolah, serta anak-anak yang nakal.¹

Semakin meningkat jumlah penduduk tiap tahunnya dan juga dampak positifnya bagi perkembangan usaha kecil di Kecamatan Rupert. Sehingga membuat UPTD Sosial Kecamatan Rupert melakukan survey kelapangan untuk melakukan berbagai analisis prospek usaha kecil yang pada hakikatnya membantu.

Jika diperhatikan program kemitraan yang dilakukan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert terhadap mitra binaannya adalah dari segi:

1. Memberikan Modal

Adapun tujuan hubungan kemitraan UPTD Sosial dengan pengusaha kecil adalah tidak lain untuk meningkatkan usaha mitranya dalam hal permodalan, keterampilan, produksi, pemasaran dan pendapatan yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya mitra binaan UPTD Sosial Kecamatan Rupert.

Untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil mitra binaannya, UPTD Sosial berusaha memberikan bantuan berupa permodalan karena dilihat dari segi kendala-kendala usaha kecil banyak

¹ Mohammad Zain, *Wawancara, tanggal 8 September 2012.*

sekali usaha-usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil tersebut tidak bisa dikembangkan karena masalah permodalan.

Sebenarnya usaha-usaha yang dijalankan oleh para pengusaha secara kecil-kecilan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran sehingga kemiskinan sedikit demi sedikit dapat diatasi. Karena tidak memiliki modal sesuai yang dibutuhkan untuk menjalani usahanya maka usaha yang dijalankan tersebut tidak bisa diteruskan dan akhirnya mengalami kebangkrutan sehingga terjadinya pengangguran.

Pemberian bantuan modal oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert diberikan secara cuma-cuma atau hibah. Besarnya pemberian bantuan modal oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert adalah sebesar Rp. 15.000.000 perorang. Adapun Pemberian bantuan modal khusus untuk usaha dibidang sembako. Bantuan ini, diberikan pada tahun 2009 akhir. Anggaran dana bantuan modal yang diberikan berasal dari APBD II kabupaten Bengkalis.

Seperti yang dialami Bapak Suwardi salah satu anggota yang memperoleh bantuan dari UPTD Sosial Kecamatan Rupert menyatakan bahwa, sebelum ada UPTD Sosial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia harus bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin karena tidak punya penghasilan tetap. Namun setelah adanya UPTD Sosial Kecamatan Rupert, Bapak Suwardi merasa lebih baik dari sebelumnya. Dengan bantuan yang diterimanya dipergunakan untuk membuka warung

sembako sehingga bapak Suwardi mempunyai penghasilan tetap dari usaha warungnya.²

Pemberian bantuan yang dijadikan mitra binaan UPTD Sosial menggunakan beberapa kriteria, diantaranya adalah:

- a. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan yang lepas
- b. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap. Seperti petani yang menyadap karet, pekerjaan mereka tetap tapi penghasilannya tergantung pada musim yang ada.
- c. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti cacat atau sakit
- d. Masyarakat yang pendapatannya kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
- e. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang banyak.³

Adapun proses penyaluran ini dilakukan secara langsung oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert kepada masyarakat yang membutuhkan terutama bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan.

Pada tahun 2012 bantuan yang dikeluarkan tidak lagi bantuan dibidang sembako tetapi bantuan yang berbentuk KUBE yaitu kelompok usaha bersama, yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang.

² Bapak Suwardi (Salah Satu Mitra Binaan UPTD Sosial Kecamatan Rupert), *Wawancara tanggal 15 Oktober 2012.*

³ Mohammad Zain (Kepala UPTD Sosial Kecamatan Rupert), *Wawancara, tanggal 8 September 2012.*

Didalam pengelolaan KUBE ini, usaha yang dijalankan tidak ditetapkan oleh UPTD Sosial. Usaha yang dikelola oleh tiap-tiap KUBE bermacam-macam, ada didalamnya usaha dibidang peternakan seperti ternak ayam, kambing, ikan lele dan sebagainya, serta ada juga anggota KUBE yang membentuk usaha dibidang pertanian salah satunya penanaman jagung.

2. Melakukan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Sosial kepada mitra binaannya adalah:

Untuk mengembangkan usaha yang dikelola oleh para mitra yang telah menerima bantuan, maka UPTD Sosial tidak dengan begitu saja hanya memberikan modal tetapi setelah mitranya diberi modal, UPTD Sosial juga melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh mitranya. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Sosial adalah dalam bentuk kunjungan ketempat usaha mitra binaannya yang telah diberikan bantuan modal tersebut.⁴

Dalam melakukan kunjungan ketempat usaha yang dijalankan mitranya, UPTD Sosial melakukan kunjungan yang tidak ditetapkan waktunya. Dan yang menjadi pengawasannya adalah kepala UPTD Sosial

Tujuan dilaksanakan pengawasan oleh UPTD Sosial adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan

⁴ Mohammad Zain, Wawancara, tanggal 8 Desember 2012.

oleh mitranya dan untuk menghindari risiko penyelewengan oleh para mitranya.

3. Melakukan Pengarahan dan Pembinaan

Pengarahan yang diberikan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupat kepada mitranya berupa motivasi untuk lebih meningkatkan usahanya. Motivasi yang dilakukan oleh UPTD Sosial adalah dengan mengadakan pertemuan bagi mitanya dan memberikan arahan serta bimbingan bagaimana meningkatkan usaha yang dijalankan dengan modal yang diberikannya.

Arahan dan bimbingan ini diberikan melalui adanya seminar-seminar yang diadakan oleh UPTD Sosial dengan sebuah instansi pemerintah guna memberikna pengarahan bagi pengusaha kecil yang dijadikan mitra binaannya bagaimana mengembangkan usaha agar memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin.

UPTD Sosial selain memberikan pengawasan dan pengarahan bagi mitranya juga melakukan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan agar dapat berkembang menjadi lebih dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.⁵ UPTD Sosial bersedia melakukan pembinaan terhadap mitra binaan dengan tujuan agar nantinya para mitranya tersebut dapat berusaha secara mandiri.

Pembinaan yang diberikan kepada mitranya berupa pelatihan keterampilan dan manajemen berusaha, karena sebagian pengusaha kecil

⁵ Mohammads Zain, *Wawancara, tanggal 8 September 2012.*

menjalankan usahanya tanpa pengetahuan dan manajemen berusaha yang baik sehingga usaha yang dijalankan tidak dapat dikontrol bagaimana perkembangannya.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh usaha kecil adalah minimnya kemampuan dan sumber daya manusia untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Misalnya prinsip pertama membuat rencana usaha sering diabaikan. Dengan tidak adanya rencana keuangan, rencana prasarana, rencana produksi serta sistem pembukuan, maka usaha ini hanya berjalan berdasarkan kebiasaan. Oleh karena itu banyak usaha kecil tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Dengan adanya bantuan ini, maka diyakini dapat membawa perubahan bagi usaha mitra UPTD Sosial. Karena modal yang diberikan disertai juga dengan arahan dan bimbingan tentang bagaimana menjalankan usaha yang baik dan benar agar mendapatkan keuntungan dan memperkembangkan usaha mereka.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi UPTD Sosial Kecamatan Rupert Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan di Kecamatan Rupert

1. Kendala dalam aspek pemberian modal, dalam pelaksanaan program kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di UPTD Sosial Kecamatan Rupert
 - a) Di dalam pelaksanaan program kemitraan ini terbatasnya dana (modal) yang disalurkan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert;

- b) Pemberian modal atau bantuan dana ini, belum sesuai dengan yang berhak menerimanya;
- c) Kurangnya peran pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di UPTD sosial Kecamatan Rupert, diakibatkan anggota yang berada UPTD Sosial tersebut masih kurang.⁶

2. Kendala Pembinaan Dalam Aspek Keterampilan

- a) Saat pemberian pembinaan dan pelatihan masih banyak yang tidak mengikutinya, sehingga sulit mengetahui yang dihadapi usaha kecil dalam menjalankan usahanya.
- b) Kurangnya sumber daya manusia, lemahnya sumber daya manusia, dapat dikarenakan beberapa macam sebab, antara lain seperti budaya masyarakat, struktur masyarakat, gejala yang tampil dari lemahnya sumber daya manusia adalah;
 - 1) Lemahnya kemauan, merasa tidak mampu, tidak percaya diri dan merasa rendah diri, terbatasnya pengetahuan, terbatasnya keterampilan, tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan.
 - 2) Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terarah.
- c) Kurangnya informasi-informasi yang luas, actual dan akurat agar dapat membuka ketertutupan pandangan dan wawasan, dan pada tahap selanjutnya.

⁶ Mohammad Zain (Kepala UPTD Sosial Kecamatan Rupert), *Wawancara, tanggal 8 September 2012.*

- d) Kurangnya motivasi dan arahan, yang dapat menumbuhkan semangat untuk melaksanakan sesuatu atau beberapa tugas pekerjaan dengan adanya kepercayaan diri yang sangat kuat sehingga ada semangat untuk mewujudkan suatu tujuan peningkatan produktivitas dan kemampuan diri.
- e) Kurangnya metodologi dan sistem kerja, yang memberikan cara penyesuaian masalah dengan efektif dan efisien, secara terus menerus manusia potensial, actual dan fungsional.

3. Kendala Pembinaan Dalam Aspek Pelatihan

Kurang kesadaran para mitra nya dalam mengikuti pelatihan baik pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan teknologi. Indikasi dari diadakan ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang manajemen dan administrasi sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi hanyalah ada satu jalan pemecahan yang harus ditempuh, yakni melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihanlah yang akan meningkatkan kemauan, kemampuan dan kesempatan bagi seseorang untuk berperan dalam kehidupannya, secara individu maupun masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap usaha kecil di daerah Kecamatan Rupert berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat setempat permasalahan yang terjadi yaitu:

a. Pemasaran

Bentuk sistem pemasaran hasil produksi di kecamatan Rupert yaitu bentuknya secara personal atau individu. Indikasinya dengan sistem pemasaran secara personal atau individu para pengusaha kecil dapat berhasil memasarkan hasil produksinya secara personal atau individu melalui akses pasar di seluruh Kecamatan Rupert.

b. Kurangnya pemberian bantuan fasilitas pemasaran hasil produksi

Kurangnya dengan cara promosi serta perluasan jaringan pasar. Melalui bantuan pemasaran tersebut masalah hasil pemasaran produk dapat diatasi dan akhirnya akan meningkatkan jumlah penjualan.⁷

c. Kurangnya perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan.

d. Kurangnya pengorganisasian dalam mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja dan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

e. Kurangnya pengarahan dalam kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

f. Kurangnya pengembangan dalam meningkatkan keterampilan teknis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan

⁷ Mohammad Zain (Kepala UPTD Sosial Kecamatan Rupert), *Wawancara, tanggal 8 September 2012.*

yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa depan.⁸

Data di atas menurut hasil yang penulis peroleh, jika dana sudah disalurkan maka UPTD Sosial mengadakan pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh pengusaha kecil yang telah mendapat penyaluran dana, seperti pembinaan keterampilan pengusaha kecil. Pelaksanaan ini sering dilakukan namun masih ada pengusaha kecil yang tidak mengikutinya, hal ini menjadi suatu kendala bagi UPTD Sosial untuk mengetahui apa yang dihadapi usaha kecil dalam menjalankan usahanya atau dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

C. Pelaksanaan Kemitraan UPTD Sosial Kecamatan Rupert Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mitra Binaannya Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Yang dimaksud cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah. Jadi ilmu ekonomi Islam mendasarkan aspek tujuan, metode penurunan ilmu dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam.⁹

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu

⁸ Mohammad Zain (Kepala UPTD Sosial Kecamatan Rupert), *Wawancara, tanggal 8 September 2012.*

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet.I, h. 43-44.

sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari Syari'at yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah¹⁰. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam norma moral Islam
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹¹

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, sebab Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain baik urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dalam Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena Ridho Allah.

¹⁰ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. I, hal. 1.

¹¹ Merza Gamal, *Aktifis Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaeu: UNRI Press, 2004), Cet. I, hal. 3-4.

1. Dalam Aspek Pemberian Modal

Pemberian modal serta pembinaan usaha kecil di Kecamatan Rupat bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya, karena dengan meningkatkan pendapatan para pengusaha kecil tersebut berarti dapat pula meningkatkan kesejahteraannya.

Uraian di atas dapat dilihat bahwa program kemitraan ini tidak mengurangi kemiskinan, namun kemitraan ini dapat membantu masyarakat agar dapat bertahan hidup. Bantuan ini hanya dapat menambah pendapatan masyarakat dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun peranan tersebut relative kecil karena jumlahnya relative kecil dan bersifat sementara.

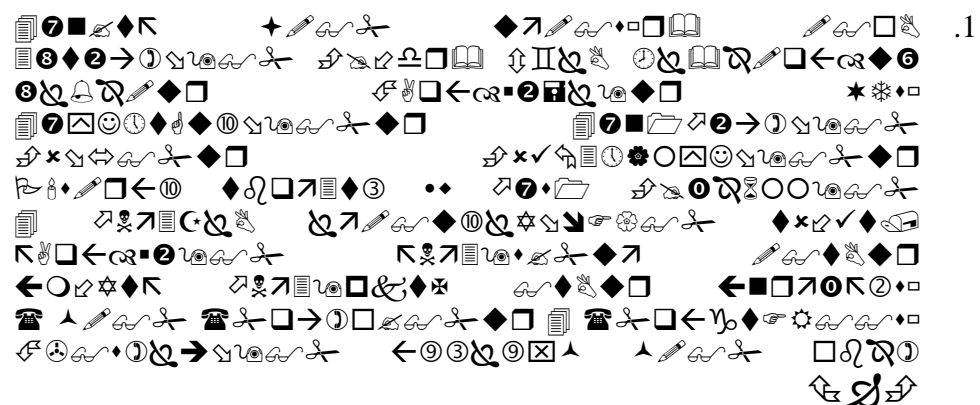
Kemitraan ini juga sesuai dengan keadaan masyarakat dan dinilai kurang efektif karena sebagian mitra UPTD Sosial ini hanya memanfaatkan bantuan yang ia dapat, tetapi ia tidak mengembangkannya lagi pada hal mereka telah diberi pembinaan dan pelatihan terhadap program yang dijalankan oleh UPTD Sosial tersebut. Tetapi setidaknya dengan program kemitraan ini membuka peluang kepada mitranya untuk menambah pengetahuan dan memberikan bekal kepada mitranya untuk kedepannya.

Didalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerjaan lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai hidup anggota keluarganya yang banyak dan bagi mereka yang tidak

mempunyai pekerjaan karena kondisi fisiknya seperti cacat, janda atau lain-lainnya.

Walaupun demikian, setelah adanya program tersebut setidaknya pendapatan masyarakat bertambah dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Jelas bahwa bantuan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat membantu masyarakat agar dapat bertahan hidup dan menambah pendapatan. Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dan juga tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini karena Islam telah melarang beredarnya harta hanya pada golongan tertentu sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Asyr ayat 7



Artinya : “Apa saja harta rampasan yang diberika Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kam kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalh dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. Al-Asyr : 7).¹²

¹² Ibid., hal. 141

Islam juga menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan untuk menggunakan sistem ekonomi Islam, diantaranya menyeru manusia untuk berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya ; carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, tidak dizalimi dan menzalimi, menjauh diri dari unsur riba, maisir dan gharar serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak, dan sadaqah, inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan perekonomiannya¹³.

Islam memberikan tugas bagi setiap pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberikan perhatian utama pada tercukupya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan,

¹³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 12.

kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Dalam hal ini banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti bantuan bantuan ini, dalam ekonomi Islam dikenal dengan hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun¹⁴. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebajikan sesama manusia sangat baik dan bernilai positif. Pada dasarnya hukum hibah ini Sunah dan jika dikaitkan dengan tanggungjawab pemerintah memperhatikan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka sangat dianjurkan.

2. Melakukan Pengawasan

Program bantuan ini akan membawa dampak positif terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Rupert. Untuk itu diharapkan dalam penyaluran terkadang unsur tanggungjawab, tolong menolong, dan unsur amanah.

1. Tanggungjawab

Pemerintah sebagai pemimpin dalam masyarakat arti yang luas bertanggungjawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخار و مسلم، وترمز)

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 76.

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yaitu setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Ianya adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas rakyatnya”. (HR. Bukhari, Muslim dan Turmidzi).¹⁵

Hadis di atas menyatakan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkat dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintah juga bertanggungjawab untuk memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Karena antara pemimpin dengan rakyat ibarat wali dengan anak yatim.

Begitu juga dalam program ini UPTD Sosial harus bertanggungjawab terhadap penyaluran dan kemitraan. Mulai dari puncaknya sampai kepada masyarakat yang menerimanya. Bantuan tersebut hendaknya sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

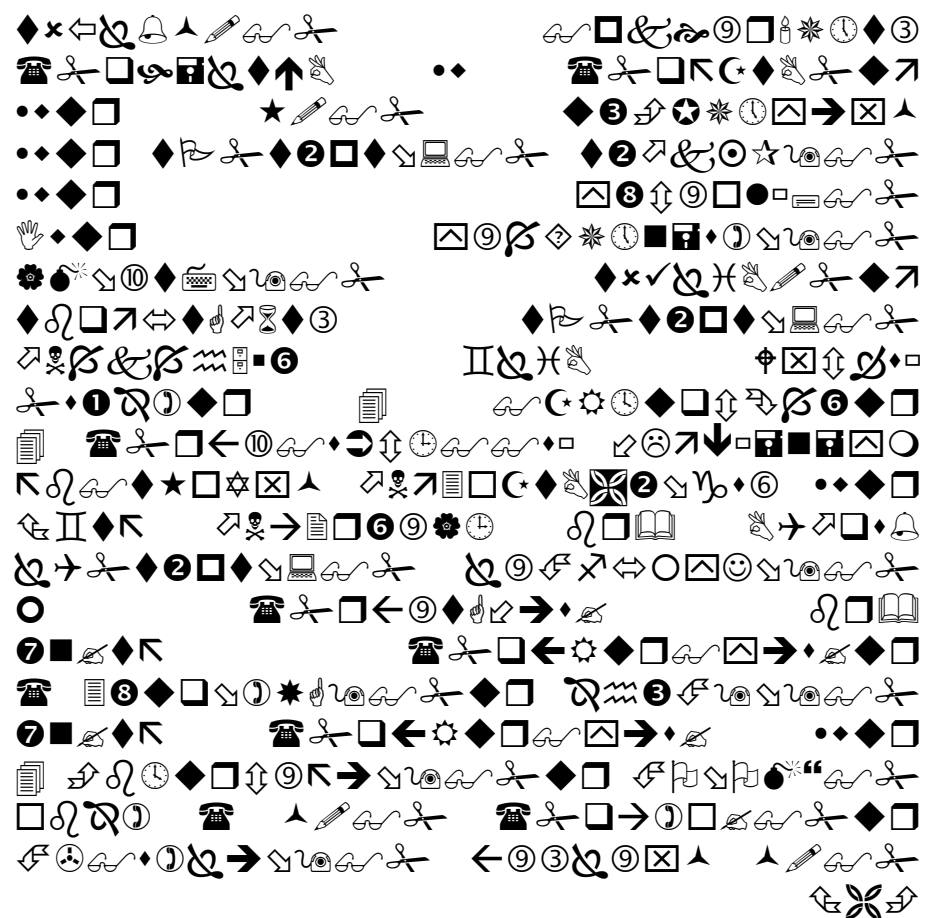
2. Tolong Menolong

Bantuan atau kemitraan yang diberikan sangat berguna untuk mengatasi atau membantu kelompok masyarakat yang pendapatannya terganggu akibat perubahan sosial. Bantuan kepada mereka yang lemah atau miskin atau yang memerlukan bantuan dapat berupa kebutuhan

¹⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jus 3, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 1010.

pokok seperti pangan, sandang, papan dan obat-obatan serta pendidikan.

Untuk Kecamatan Rupert, Pemerintah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan berupa bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya, binatang qilaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungai baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah selesai ibadah haji maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat

aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berta siksa-Nya” (QS. Al-Maidah : 2).¹⁶

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an, karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apapun yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.

¹⁶ Departemen Agama, *op. cit.*, hal. 156.

3. Amanah

Program kemitraan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rupert jumlahnya banyak. Maka perlu diadakan penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh UPTD Sosial.

Dalam penentuan kemitraan tersebut, masyarakat yang berhak menerima kemitraan tersebut benar-benar mereka yang mempunyai masalah kesejahteraan masyarakat seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, atau yang berpenghasilan tidak mencukupi biaya hidup keluarganya. Serta mereka yang putus sekolah, serta mereka yang cacat fisik.

Mereka yang masuk kedalam kategori yang ditetapkan oleh UPTD Sosial di antaranya mereka yang mengalami masalah tersebut di atas. Namun kenyataannya penerima kemitraan atau bantuan di Kecamatan Rupert masih terdapat masyarakat yang mampu atau tidak termasuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan. Diantaranya mereka masih tergolong perangkat desa atau disebut dengan RW, yang tergolong dalam masyarakat yang mampu.

Dalam Islam hal ini dilarang, karena kemitraan atau bantuan yang ada untuk masyarakat yang mengalami kesenjangan terhadap kesejahteraannya. Jadi kepada mereka yang memenuhi syarat bantuan itu diberikan, karena merupakan hak mereka yang telah terdaftar

tersebut. Dalam hal yang menjadi hak mereka hendaknya disampaikan, karena itu adalah amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 58:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan

amanah kepada yang berhak menerimanya, Dan apabila menetapkan hukumnya diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. An-Nisa' :58).¹⁷

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan atau kemitraan ini hendaknya betul-betul menetapkan criteria kepada yang berhak menerimanya agar terciptanya sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

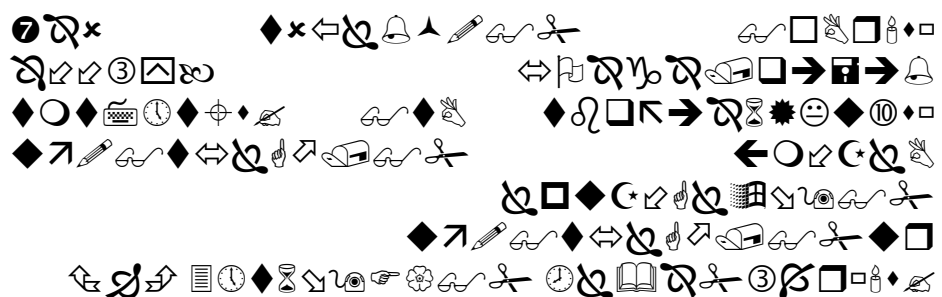
Disamping itu jika terjadi penambahan masyarakat penerima kemitraan atau bantuan. Maka hendaknya betul-betul melihat orang yang menerimanya.

3. Melakukan Pengarahan dan Pembinaan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 123

Masih lemahnya perhatian masyarakat dalam pendidikan keterampilan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aspek pembinaan manajemen kurangnya perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membantu terwujudnya tujuan. Kurangnya pengorganisasian dalam mengorganisasi harus ditetapkan pada kemampuannya¹⁸.

Dalam Islam, pengorganisasian harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing tenaga kerja. Baik dari segi pengetahuan maupun dari kemampuan mengatur sebuah usaha. Sesungguhnya keduanya merupakan kualitas yang penting bagi seorang organisator yang efisien dan berhasil. Mengingat sangat pentingnya organisasi dalam sebuah usaha, maka mutlak untuk mengangkat orang yang tepat dan yang benar-benar cocok serta berkualitas untuk sebuah pekerjaan. Pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dinilai dari kenyataan bahwa Allah dikenal sebagai pengatur yang paling baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 7 sebagai berikut:

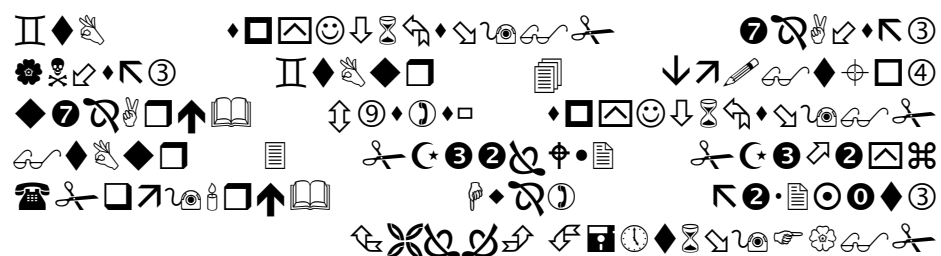


¹⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 273.

Artinya: “ Bagi kamu, Tuhanlah yang mencukupi, dan dialah yang paling baik pengaturan-Nya dalam setiap urusan”.¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diperingatkan untuk melakukan yang paling baik dan kemudian untuk mempercayakan urusannya pada penjaga Allah, sebagai pengurus dan pengatur yang paling baik.

dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan juga turut meningkatkan efisiensi. Seorang yang bekerja atau berusaha yang baik terlatih dan terdidik akan bekerja lebih efisien dibandingkan yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Keutamaan pendidikan dan pelatihan disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “ Dan barang siapa yang dianugrahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak”.²⁰

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai manfaat yang paling banyak. Dengan demikian berarti Al-Qur'an mengacu pada kualitas ini sebagai faktor yang sangat penting dalam berusaha.

Pemasaran dalam Islam harus mengutamakan kejujuran dalam promosi dan menentukan harga sebuah produk yang akan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Toha Putra, 2002) hal. 125.

²⁰ *Ibid*, hal. 45.

mempengaruhi tingkat penjualan. Dalam kebijakan yang tepat supaya produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen sesuai kriteria yang mereka inginkan. Dalam kebijakan distribusi, pengusaha harus mencari cara yang paling efektif untuk dapat membina dan mendekati para pembeli sehingga produk-produk dapat sampai ke konsumen dengan efektif. Dan juga dalam promosi produk kegiatan promosi yang dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran dalam Islam secara keseluruhan sehingga dapat berperan secara berarti dalam meningkatkan penjualan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh UPTD Sosial yaitu meliputi pemberian modal, pengawasan serta pembinaan terhadap pengusaha kecil. Faktor yang melatar belakangi UPTD Sosial dalam melakukan kemitraan ini karena terdapat masyarakat yang kurang mampu baik dalam permodalan maupun dalam kemampuan dan sumber daya manusia untuk mengelola usaha sesuai prinsip-prinsip manajemen modern. Mereka hanya menjalankan Usaha ini berdasarkan kebiasaan saja. Sehingga diadakan program kemitraan ini dengan tujuan agar mereka dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kendala dalam program kemitraan ini yaitu dalam penyaluran bantuan modalnya masih diberikan kepada orang-orang terdekat dengan kata lain didalam penyaluran bantuan modal tidak sesuai dengan kriteria orang yang berhak menerimanya. Sehingga masih belum terciptanya keadilan yang menyeluruh, kendala lainnya dalam aspek pengawasan bisa dikatakan kurang efektif. Karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Sosial Kecamatan Rupert, hal ini dikarenakan anggota yang termasuk kedalam jajaran UPTD Sosial tersebut masih kurang. Kendala berikutnya yaitu didalam pembinaan salah satunya, didalam pembinaan

dibidang keterampilan masih banyak pengusaha kecil yang tidak mengikuti, sehingga sulit untuk mengetahui yang dihadapi oleh mitranya dan lemahnya kemauan pengusaha kecil didalam pembinaan, terbatasnya pengetahuan serta tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan. Kurang kesadaran para mitra nya dalam mengikuti pelatihan baik pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan teknologi.

3. Menurut ekonomi Islam, melakukan kemitraan yang menghasilkan keuntungan antara pihak yang bekerjasama dibolehkan dengan prinsip tolong menolong, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Kemitraan yang dilakukan UPTD Sosial Kecamatan Rupert memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, perlu penyempurnaan dari UPTD Sosial Kecamatan Rupert adalah penyaluran bantuan modal hendaknya benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerima (tepat sasaran). Sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta supaya kita menetapkan dengan adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis member saran atau masukan untuk membantu pihak-pihak yang terkait pelaksanaan program kemitraan khususnya di Kecamatan Rupert, antara lain :

1. Untuk penyaluran, hendaknya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Atau yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan atau kemitraan itu, supaya tercipta rasa keadilan.

2. Diharapkan dari kerjasama yang dilakukan oleh UPTD Sosial ini dapat menarik minat dan menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku ekonomi lainnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kemiskinan dan pengangguran sedikit demi sedikit bias teratasi.
3. Kepada Masyarakat dapat memanfaatkan program kemitraan ini dengan sebaik-baiknya agar UPTD Sosial Kecamatan Rupat memberikan rasa kepercayaan untuk menyalurkan kembali bantuan apabila diperlukan oleh pengusaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Ekonisa, 2002).
- Abu Daud Sulaiman Bin Asy Ats, *Shahih Abu Daud*, Jus 3, (Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi, tt).
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997).
- A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1998).
- Christian Lampelius, Gert Thoma, *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: LP3ES, 1979).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. toha Putra, 2002).
- [Http:///Fathul Barie V: 129.co.id](http://FathulBarieV:129.co.id).
- Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: alfabeta, 2009).
- James dan Akrasane, *Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta : LP3ES, 1993).
- Jeane Neltje saly, *Usaha kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif perdagangan internasional*, (Jakarta: badan Pembinaan hukum Nasional, 2001).
- Martin Carnoy dan Derek Shearer, *Economic Democracy*, (Sharpe Inc, 1980).
- Maryoto, Rahmat, *Serikat Pekerja Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991).
- Merza Gamal, *Aktifis Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaeu: UNRI Press, 2004).
- Mudrajat, Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007).
- Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi I,(Yogyakarta: BPFE, 2002).
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jus 3, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987).
- M. Zain (Kepala UPTD Sosial Kecamatan Rupert).
- Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).

- M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- M. Sholihuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalm Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 1997).
- Sudono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses)*, (Bandung: Salemba Empat, 2003).
- Tarsis Tarmuji, *Prinsip-Prinsip Wirausaha*, (Yogyakarta: Liberty, 1996).
- Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Gbalia Indonesia, 2001).
- Zulkairnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa 2003).
- Zulkarnaian, *Kewirausahaan "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin"*, (Yogyakarta: Adicita, 2006).